

MEWASPADAI KECENDERUNGAN MASSA BERTINDAK BRUTAL

Tindakan brutal akhir-akhir ini semakin merebak, menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Kebrutalan, nampaknya dapat melanda dan dilakukan oleh siapa saja tanpa pandang strata sosial, walaupun dapat berbeda frekwensi dan kualitas dari produk perilaku kebrutalannya. Orang boleh mengangkat sejumlah kambing hitam kenapa kebrutalan mudah terangsang. Mulai dari cepatnya perubahan, kesenjangan pembangunan, kesenjangan tuntutan kebutuhan dengan kemampuan riil untuk memenuhinya, sampai dengan persaingan yang semakin sengit / tajam.

Dalam perspektif perilaku sosial, suatu masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu yang disebut sebagai "zone of peace" serta "zone of war". Pada umumnya kelompok masyarakat yang disebut pertama relatif tidak menimbulkan permasalahan, tetapi kelompok masyarakat yang termasuk kelompok kedua, relatif lebih mudah berbuat brutal atau terlibat dalam perilaku yang brutal. Hal ini mudah dipahami karena mereka yang berada pada lapis "zone of war", adalah individu-individu yang "nothing to lose". Kelompok masyarakat ini adalah juga manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama, karenanya tidak layak untuk dilupakan / diabaikan.

Karena rasa tidak puas dengan keadaan hidupnya (kebanyakan karena faktor-faktor struktural) mereka cenderung untuk melawan sistem atau tata kehidupan yang ada di

sekitarnya. Misalnya orang yang memiliki tanah luas. Karena ekspansi pembangunan, dia harus melepas tanahnya untuk kepentingan proyek pembangunan. Karena tidak memiliki kemampuan kreatif, hasil ganti rugi tanah habis secara konsumtif, sementara dia sendiri terserap dalam proyek yang ada karena keterbatasan ketrampilan. Akibatnya dia menjadi miskin, sementara orang yang miskin tetapi berketrampilan, bangkit status sosialnya. Dia menjadi cemburu dan merasa menjadi korban pembangunan. Kelompok seperti inilah yang mudah dipanas-panasi dan lebih mudah bersikap brutal.

Tindakan brutal ini bisa terjadi dan dilaksanakan secara orang perorang karena adanya tuntutan dan *interest* pribadi. Dapat juga bersifat komunal karena adanya perasaan senasib sepenanggungan, atau secara lateral (ketidak seimbangan secara kondisional) karena dirangsang oleh adanya ketidakadilan.

Kasus perkelahian pelajar, mahasiswa dan antar kelompok dalam masyarakat misalnya, merupakan perpaduan antara stimulus atau rangsangan kekecewaan pribadi, rasa senasib sepenanggungan dan ketimpangan sosial. Demikian pula tindakan kriminalitas yang disertai demoralisasi dan dehumanisasi. Misalnya, perampokan yang disertai pemerkosaan beramai-ramai, atau pembunuhan dengan mencincang-cincang korban dan lain-lain. Secara inderawi kita lebih terperangah lagi, bila mengetahui bahwa tidak sedikit perilaku brutal dimaksud hanya karena sebab yang sangat sepele.

Dari berbagai kasus yang terjadi, apabila diperhatikan secara mendalam ada faktor-faktor yang turut berperan sehingga muncul kebrutalan, antara lain adalah :

Pertama :

Faktor moral. Moral mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tindakan seseorang merupakan pencerminan dari moral yang bersangkutan. Moral berkembang sejalan dengan tata nilai dan sistem yang mewadahnya.

Apabila tata nilai dan sistem yang mewadahi dapat memberikan jaminan kepastian masa depan bagi kehidupan individu-individu di dalamnya, maka moral masyarakat akan demikian kuat mengikat dan berkembang ke arah yang positif.

Kedua :

Faktor Politik. Sistem politik suatu negara diharapkan dapat memberikan peluang bagi berkembangnya aspirasi masyarakat. Apabila masyarakat ada tekanan atau pembatasan terhadap aspirasinya akan timbul ketidakpuasan.

Ketidakpuasan akan semakin destruktif apabila tidak memiliki saluran atau wadah yang dianggap memadai dan mampu memperjuangkan aspirasi atau kebutuhannya. Kumulasi kondisi seperti itu adalah, munculnya kekuatan alternatif yang belum tentu bertanggung jawab, yang justru sangat mungkin memanaskan keadaan, dan merangsang seseorang/ kelompok untuk berbuat menurut caranya sendiri.

Ketiga :

Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat akan sangat menentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindaknya.

Seberapa jauh tingkat pendidikan masyarakat dapat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang ada, dan sebaliknya dapat mempengaruhi etika masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih menimbulkan ketidak-seimbangan di dalam kehidupan masyarakat apabila dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan.

Keempat:

Faktor kesempatan kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja dihadapkan dengan terbatasnya lapangan kerja, berakibat terjadinya banyak pengangguran. Sementara lapangan kerja yang tersediapun belum dapat memberikan penghasilan yang mencukupi bagi pencari kerja yang terserap didalamnya. Keadaan yang demikian akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat selain juga menciptakan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi.

Kelima :

Faktor pengaruh budaya asing. Arus informasi dan komunikasi telah mampu menembus batas ruang dan waktu sehingga seolah-olah dunia ini menjadi satu. Budaya asing yang masuk Indonesia baik melalui media cetak, elektronika, maupun yang dibawa oleh para wisatawan manca negara banyak mempengaruhi budaya kita dan tidak jarang justru bertentangan dengan budaya yang kita miliki. Berita dan tayangan visual tentang sadisme yang terjadi di seluruh penjuru dunia, baik dalam bentuk cerita fiksi maupun kejadian nyata, begitu mudah mempengaruhi perilaku masyarakat kita yang hidup dalam ketidakpuasan,

sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan imitatif yang brutal.

Keenam :

Faktor penegakan hukum. Upaya Pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional telah dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Meskipun sudah banyak hasil yang dicapai tetapi masih banyak pula yang memerlukan penanganan lebih serius khususnya oleh aparat Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang hukum.

Salah satu di antaranya adalah penegakan hukum dan keadilan sehingga dapat memberi jaminan kepastian bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial yang ada. Dalam kenyataannya upaya penegakan hukum ini masih sering dirasakan oleh masyarakat belum dapat memberikan rasa keadilan sehingga kepastian hukum dan keadilan terasa demikian mahalnya di negeri hukum ini. Akibatnya muncul ketidakpuasan, yang menyebabkan timbulnya tindakan yang justru melawan hukum.

Memperhatikan uraian di atas, kepada Prajurit ABRI dan Jajaran KBA, ditekankan hal-hal sebagai berikut :

Pertama :

Semakin mendorong keberhasilan sosialisasi gerakan disiplin nasional, agar warga masyarakat semakin patuh pada nilai dan norma masyarakat maupun hukum yang berlaku.

Kedua:

Mengedepankan keteladanan dan

kesederhanaan sebagai prajurit Sapta Marga, dalam rangka meredam kecemburuan sosial dan memberi contoh kepada masyarakat agar tidak mengalami kegampangan dalam menghadapi berbagai perubahan.

Ketiga :

Memperkokoh kemanunggalan ABRI-Rakyat sebagai fondasi persatuan dan kesatuan, agar warga masyarakat tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang merusak kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, sehingga terwujud ketahanan sosial budaya yang kokoh dan mampu menangkal pengaruh asing yang negatif.

Keempat :

Wujudkan iklim yang kondusif dan dorong setiap lembaga berfungsi secara optimal, agar moral masyarakat, kepastian hukum serta kondisi sosial politik maupun budaya benar-benar menjadi kekuatan positif dan mendukung terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera.

Kelima :

Bantu lembaga-lembaga masyarakat yang ada untuk lebih giat membina generasi muda dan remaja, melalui kegiatan yang positif dan kreatif, seperti olah raga, Karang Taruna, kerja sosial, pengajian (kegiatan keagamaan) dan lain-lain, sehingga memiliki etika dan moral yang tangguh.

(Sumber dari: SESBID-V/ BAKORSTANAS)

